

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS REALIS PADA**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENGGRUSAKAN**

(Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks)



**OLEH**

**NURHIKMAH DWI SEPTYAWATI**

**B11113115**

**Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2017**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS REALIS PADA  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENGUSAKAN**

(Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks)

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**NURHIKMAH DWI SEPTYAWATI**

**B111 13 115**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2017**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CONCURSUS REALIS* PADA  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENGGRUSAKAN  
(Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mrs)**

**Disusun dan diajukan oleh**

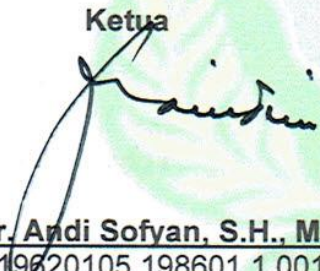
**NURHIKMAH DWI SEPTYAWATI  
B 111 13 115**

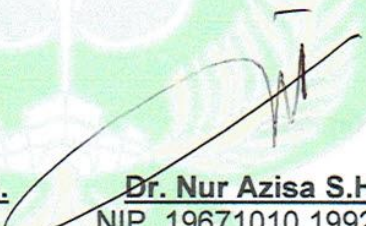
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 20 Februari 2017  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

  
**Dr. Nur Azisa S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**A.n. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan,**

  
  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nurhikmah Dwi Septyawati

Nomor Pokok : B 111 13 115

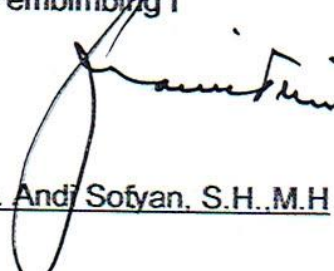
Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada  
Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengrusakan  
(Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks)

Makassar, Januari 2017

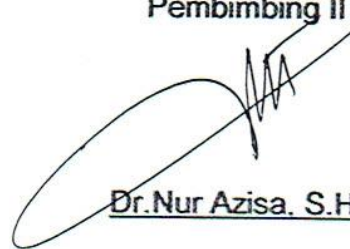
Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H

NIP.19620105198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H

NIP.19671010199202 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686.587219. E-mail:hukum@unhas.ac.

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

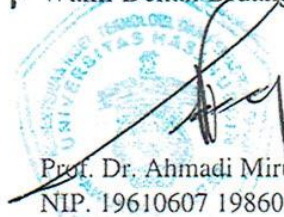
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURHIKMAH DWI-SEPTYAWATI
Nomor Pokok	: B11113115
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengrusakan (Studi Kasus Nomor : 815/Pid.B/2016/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi:

Makassar, Februari 2017

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**NURHIKMAH DWI SEPTYAWATI (B111 13 115), “Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks)”.** Dibawah bimbingan Bapak **Andi Sofyan** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Nur Azisa** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penghukuman dalam gabungan perbuatan, untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Filosofi Pemberian Penghukuman Dalam Perbuatan Perbarengan. Mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65) penjatuhan pidananya dengan menggunakan *sistem hisapan yang diperberat* (*verscherpde absorpsi stelsel*); pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan *sistem kumulasi terbatas* (*het gematigde cumulatieve stelsel*); yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan *sistem kumulasi murni* (*het zuivere cumulatieve stelsel*); yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan *sistem kumulasi murni*. 2) Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1), hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. 3) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa Tan Moeng Hoei Alias Tan dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dimana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, selain hakim menggunakan pertimbangan yuridis selain itu juga, hakim menggunakan pertimbangan sosiologis.



## ABSTRACT

**NURHIKMAH DWI SEPTYAWATI (B111 13 115), “The Juridical to Concursus’m a Realist in Criminal Acts of Mayhem and Destruction (A Case Study of Number: 815/Pid.B/2016/PN.Mks)”.** Under the guidance of **Andi Sofyan** as Supervisor I and **Nur Azisa** as the Supervisor II.

The study aims to know the system of adjudication in joint actions, to determine the application of criminal law of the material to criminal acts of mayhem and destruction and to know the consideration of the judge in imposing criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of mayhem and destruction.

The research was carried out in the city of Makassar to select agencies that are related to this case, namely research was carried out in the District Court in Makassar. The method of collecting the data used is the method library and Other Interview, then the data obtained were analyzed a sort of descriptive set of qualitative and said the expected results and conclusions of the problem.

The results showed that: 1) The philosophy of the Punishment in actions *Perbarengan*. Regarding *perbarengan* the law to be 4 (four) kinds, namely: a staple of the same kind (Article 65) the imposition of criminal by using the suction that is increased (*verscheppte* to absorb steles); criminal subject is not the same type (Article 66), the imposition of criminal by using the system *kumulasi* limited (*het gematigde cumulatie steles*) which consists of crimes with violations, the impositions of the criminal system *kumulasi* a pure (*het zuivere cumulatie steles*), which consists of violations with a violation, using the system *kumulasi*. 2) Applications of criminal law of the material in Decision No. The Case Number: 815/Pid.B/2016/PN.Mks said that the proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of mayhem and destruction that was provided for in Article 351, paragraph (1) and Article 406 paragraph (1), it was in accordance with and had been based on facts uncovered in the trial, evidence of a legitimate form of witness testimony, evidence, and a description of the accused. 3) Consideration of the judge the District Court in Makassar, the defendant Tan Moeng Hoei Also known as Tan was given by imprisonment for two (Two) the moon, where the convict of the perpetrators, in addition to the judge to use the terms of jurisdiction, in addition, the judge using a sociological.

## UCAPAN TERIMA KASIH



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CONCURSUS REALIS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PENGUSAKAN (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks).**

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) bagian Hukum Pidana program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.



Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku pemberi motivasi terbesar penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya **Alm. Ayahanda Sulaiman Bakri** dan **Ibunda St. Normawati** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, selalu memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara penulis: **Sulmawati Eka Purnamasari, S.E** dan **Nurfadillah Afriyanti**, terimakasih keluarga tercintaku atas motivasi dan doa yang tak henti-hentinya.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, terimakasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Syukri Akub, S.H.,M.H., Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku penguji, terimakasih atas masukan dan saran-sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis.
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan beserta seluruh jajaran staf Pengadilan Negeri Makassar. Terimakasih atas kerja samanya dalam memberikan waktu dan tempat dan kerja samanya selama Penulis melakukan penelitian.

9. Sahabat-sahabat terbaikku “EEO CLUB” yang selama ini telah mengajarkan arti sebuah persahabatan kepada penulis. Terimakasih atas doa, *support*, dan solidaritasnya selama ini. Semoga kita selalu bisa saling berbagi dan meraih kesuksesan bersama-sama. Amin.
10. Teman-teman seperjuangan “Asas 2013” terimakasih penulis ucapkan telah banyak persaudaraan, ilmu, kebersamaan, dan pengalaman yang tidak akan terlupakan.
11. Teman-teman organisasiku tercinta International Law Students’ Association Hasanuddin University “ILSA”. Terimakasih atas segala kebaikan, saran, kritikan, serta suka dan duka yang kalian bagi selama ini.
12. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Universitas Hasanuddin Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap terkhusus Posko Desa Batu Lappa, terimakasih atas kerjasamanya selama KKN.
13. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

**Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, Januari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan Penelitian .....	6
D.    Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A.    Tindak Pidana.....	7
1.    Pengertian Tindak Pidana .....	7
2.    Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	9
B.    Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursus</i> ) .....	13
1.    Pengertian Concursus.....	13
2.    Pengaturan Di Dalam KUHP .....	19
C.    Penganiayaan.....	20
1.    Pengertian Penganiayaan .....	20
2.    Unsur-Unsur Penganiayaan .....	24
3.    Jenis-Jenis Penganiayaan.....	26
D.    Tindak Pidana Pengrusakan.....	29
1.    Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan .....	29
2.    Bentuk-bentuk Pengrusakan Barang Yang di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana .....	32
E.    Pidana dan Pemidanaan.....	43
1.    Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	43
2.    Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	45
3.    Jenis-Jenis Pidana .....	46

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A.	Lokasi Penelitian.....	52
B.	Jenis dan Sumber Data.....	52
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	53
D.	Analisis Data.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A.	Filosofi Pemberian Penghukuman Dalam Perbuatan Perbarengan.....	55
B.	Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks) .....	61
1.	Identitas Terdakwa .....	61
2.	Posisi Kasus.....	62
3.	Dakwaan JPU .....	62
4.	Tuntutan Penuntut Umum .....	67
5.	Amar Putusan .....	68
6.	Analisis Penulis .....	69
C.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks) .....	73
1.	Pertimbangan Yuridis .....	74
2.	Pertimbangan Sosiologis.....	82
3.	Analisis Penulis .....	84
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran .....	88
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan tercipta beberapa bentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat. Pola perilaku tersebut tentu ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pergaulan hidup.

Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran, usaha-usaha serta mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seseorang dapat berkaitan dengan kepentingan orang lain. Kepentingan antara individu yang satu dengan individu lainnya berbenturan, tetapi dapat pula sama dan saling menguntungkan antara keduanya. Ketika setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingannya sendiri, maka akan timbul pertentangan sesama mereka. Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri.

Meskipun setiap individu dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi mereka tetap tidak menginginkan terjadinya bentrokan (*chaos*) antara sesama anggota



masyarakat, mereka tentu menginginkan sebuah kedamaian yang memungkinkan keinginan-keinginan mereka itu terakomodasi dan terwujud.

Dalam setiap hubungan masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegan/anvullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Konsekuensinya adalah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat, agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang mendunia. Perkembangan yang terjadi mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang dapat berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala sesuatu dengan cara mewujudkan keinginannya yang menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas di negara ini.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangat diperlukan adanya tindak untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, misalnya kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat yaitu penganiayaan yang disertai dengan pengrusakan, baik itu berupa

penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian.

Hampir setiap hari terdengar tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan pengrusakan. Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Penganiayaan yang disertai dengan pengrusakan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersingggu dengan perkataan seseorang. Sering juga terjadi karena dendam lama yang memotivasi pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang.

Penganiayaan yang disertai dengan pengrusakan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar di jatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus diberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan pengrusakan ini dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan pengrusakan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang

harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu harus bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan pengrusakan, seperti halnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah filosofi pemberian penghukuman dalam perbuatan perbarengan ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks) ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui filosofi pemberian penghukuman dalam perbuatan perbarengan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks).
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*” yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah “*strafbaar feit*”, seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, dan berbagai istilah lain.

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I Made Widnyana, 2010, *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 34.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 96.

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>3</sup> Sedangkan Utrecht menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa tersebut suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nolaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>4</sup>

Kemudian menurut Muljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 20.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6.

<sup>5</sup> I Made Widnyana, *Op. Cit*, hal. 34.



syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>6</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>7</sup>

Penulis dapat berkesimpulan bahwa tindak pidana atau delik adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum dan mencocoki rumusan-rumusan delik yang dapat dikenakan sanksi pidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Dimana unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua aspek, yaitu:

### **a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoretisi**

Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa rumusan tindak pidana, begitu pula dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hal. 48.

<sup>7</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 92.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>8</sup>

Kemudian menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>9</sup>

Dan Moeljatno dalam bukunya, mengemukakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) terdiri dari beberapa unsur atau elemen, yaitu: <sup>10</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 26.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hal. 80.

<sup>10</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 69.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang<sup>11</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 81-82.

- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku.

Yang terdiri dari, yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku. Yang terdiri dari, yaitu:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

## **B. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)**

### **1. Pengertian Concursus**

Menurut Zainal Abidin Farid dalam hal penyertaan satu delik dilakukan oleh beberapa orang, dalam gabungan delik satu orang melakukan beberapa delik. Gabungan delik (yang penulis lain memakai istilah perbarengan sebagai terjemahan istilah Belanda (*samenloop*), adalah tersangka mewujudkan lebih dari satu delik dan antara satu delik dan perbuatan ini tidak ada penjatuhan pidana. Memori *van Toelichting* (memori penjelasan) WvS (KUHP) berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

*Dezelfde persoon schuldig is aan meer dan een vergrijp tegen de strafwet, terwijl nog geen dezer her eener regtelijke beslissing heeft uitgemaakt* (orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu pelanggaran terhadap undang-undang pidana, sedangkan belum ada putusan hakim yang dijatuhkan atas hal itu). (Noyon-Langemeijer Remmelink: Komentar atas Pasal 55 Ned. WvS).

Jika perbuatan-perbuatan tersebut diantarai oleh penjatuhan pidana, ia bukan gabungan delik tetapi *residive*. Artinya setelah melakukan delik ia dipidana, kemudian melakukan delik lain lagi. Dalam gabungan delik, tidak perlu diadili sekaligus, dapat pula dilakukan bertahap. Artinya, satu persatu perbuatan (delik) itu disidangkan dan diputus oleh hakim. Akan tetapi, pidana yang akan dijatuhkan

---

<sup>12</sup> Amir Ilyas, SH.,MH., Haeranah, SH., MH., Nur Azisa, SH., MH., dan Kaisaruddin, K, SH., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 103.

diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan sebelumnya, berdasarkan aturan gabungan delik (Pasal 71 KUHP).

Seringkali perkara *concursum* disidangkan bertahap karena baru ketahuan tersangka telah mewujudkan delik lain setelah dia diadili untuk delik pertama.

Perbarengan merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Dalam ajaran umum tentang perbarengan dibicarakan maksimal ancaman pidana yang hendak diterapkan.

Beberapa tindak pidana itu pada waktu yang sama atau secara bertahap harus diadili. Bentuk perbarengan jangan dicampur aduk dengan residif. Ada perbarengan apabila dilakukan beberapa tindak pidana sebelum salah satu tindak pidana itu diajukan kepengadilan. Tidaklah penting apakah tindak pidana – tindak pidana itu diajukan kepengadilan pada waktu yang sama atau secara bertahap (Pasal 63 SR dari Belanda diganti dengan Pasal 71 KUHP).

Residiv memiliki kesamaan dengan perbarengan oleh karena dalam residif dilakukan juga beberapa tindak pidana yang khusus dari residif, yaitu setelah si pelaku diadili oleh karena melakukan tindak pidana yang bersangkutan melakukan suatu tindak pidana lagi.

Adanya perbarengan apabila ada beberapa tindak pidana yang dilakukan, dan diantara beberapa tindak pidana itu si pelaku tidak diadili bertalian dengan salah satu tindak pidana yang dilakukan itu.

Adanya residif apabila ada beberapa tindak pidana, setelah si pelaku diadili, ia melakukan tindak pidana lagi.

Ada beberapa perbuatan yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai salah satu kesatuan, namun masuk dalam beberapa perumusan tindak pidana, dan dengan demikian merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana. Misalnya, untuk Indonesia mengendarai kendaraan disebelah kanan jalan (catatan: di Belanda orang berkendara disebelah kanan jalan), dan karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

### **1) Menurut Rumusan KUHP**

Menurut Barda Nawawi Arief, sebenarnya didalam KUHP tidak ada definisi mengenai *concursum*, namun demikian dari rumusan pasal-pasal nya diperoleh pengertian sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Ada *Concursum Idealis*, apabila (Pasal 63 KUHP)
  - Suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.
- b. Ada perbuatan berlanjut, apabila (Pasal 64 KUHP)
  - Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
  - Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 109.



- Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
- c. Ada *Concursus Realis*, apabila (Pasal 65 KUHP)
  - Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
  - Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.

## 2) Menurut pendapat para sarjana

Adanya istilah “perbuatan/*feit*” dalam pasal-pasal diatas menimbulkan masalah yang cukup sulit, khususnya dalam hal terdakwa hanya melakukan satu perbuatan. Kesulitan ini timbul karena dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, “perbuatan” (*feit*) itu ada yang meninjaunya secara materiil, secara fisik jasmaniah, yaitu dipikirkan terlepas dari akibatnya, terlepas dari unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur tambahan (dikenal dengan ajaran *feit materiil*); dan ada pula yang melihatnya dari sudut hukum yaitu yang dihubungkan dengan adanya akibat/keadaan yang terlarang.

Sehubungan dengan kesulitan itu, maka para sarjana mengemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:<sup>14</sup>

### a. HAZEWINKEL-SURINGA

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 110.

Ada *Concursus Idealis* apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau (*eo ipso*) masuk pula dalam peraturan pidana lain.

Misal:

- Perkosaan di jalan umum, disamping masuk Pasal 285 KUHP (perkosaan) juga mau tidak mau masuk Pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan dimuka umum).

a. POMPE

Ada *Concursus Idealis*, apabila orang melakukan suatu perbuatan konkrit yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda/obyek aturan hukum.

Misal:

- Bersetubuh dengan anaknya sendiri yang belum 15 tahun; perbuatan ini masuk Pasal 294 KUHP (perbuatan cabul dengan anaknya sendiri yang belum cukup umur) dan Pasal 287 KUHP (bersetubuh dengan wanita yang belum 15 tahun diluar perkawinan).

b. TAVERNE

Ada *Concursus Idealis*, apabila:

- Dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih; dan

- Antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain.

Misalnya:

- Orang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil diwaktu malam tanpa lampu. Dalam hal ini perbuatan hanya satu yaitu “mengendarai mobil”, tetapi dilihat dari sudut hukum ada dua perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain, yaitu: pertama, ‘mengendarai mobil dalam keadaan mabuk” (menggambarkan keadaan orang/pelakunya) dan kedua “mengendarai mobil tanpa lampu diwaktu malam” (menggambarkan keadaan mobilnya). Jadi dalam hal ini ada *concurso realis*.

#### c. VAN BEMMELEN

Ada *Concurso idealis*, apabila:

- Dengan melanggar satu kepentingan hukum.
- Dengan sendirinya melakukan perbuatan (*feit*) yang lain pula.

Misal:

- Perkosaan dijalan umum (melanggar Pasal 285 KUHP dan Pasal 281 KUHP).

Khusus mengenai penjelasan MVT mengenai kriteria untuk adanya “perbuatan berlanjut” seperti dikemukakan diatas,

Simons tidak sependapat. Mengenai syarat “ada satu keputusan kehendak”, Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu “tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan”. Berdasar pengertian yang luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan.

Misal:

- Untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh.

## **2. Pengaturan Di Dalam KUHP**

Didalam KUHP diatur dalam Pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari:<sup>15</sup>

1. Perbarengan peraturan (*Concursus Idealis*): Pasal 63 KUHP.
2. Perbuatan berlanjut (*Delictum Continuum/Voortgezette handeling*): Pasal 64 KUHP.
3. Perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*) Pasal: 65 s/d 71 KUHP.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 112.

## C. Penganiayaan

### 1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam kamus umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan diatas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan oranglain menderita atau merasakan sakit..<sup>16</sup>

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam ke-XX Buku ke II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 KUHP (terjemahan) berbunyi:<sup>17</sup>

1. “Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
2. “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
3. “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
4. “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.

---

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 481.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 68-69.

5. “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP diatas itu orang dapat mengetahui bahwa undang-undang menjelaskan tentang penganiayaan secara rumusan secara luas saja tanpa memberikan penjelasan akan unsur-unsur yang menjadi penunjang dalam tindak pidana penganiayaan itu sendiri, terkecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan yang dapat merugikan kesehatan (orang lain) itu sama saja dengan penganiayaan.

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan yang disebut penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu hanya mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Penganiayaan adalah suatu istilah yang digunakan pada KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh, namun dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara detail mengenai arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan adalah “perilaku

sewenang-wenang” pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti luas yakni yang menyangkut termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. Sementara yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia, dengan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menurut M.H Tirtaatmidjaja, menyatakan bahwa penganiayaan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidaklah dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan menambah kesehatan badan.

Ilmu pengetahuan (doktrin), mengartikan penganiayaan sebagai berikut:<sup>19</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menurut penjelasan menteri kehakiman pada pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Berbeda dengan hukumnya seandainya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain itu bukan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, misalnya perbuatan menyayat perut seseorang yang dilakukan seorang dokter untuk mengeluarkan usus buntu yang terkena usus buntu yang terkena radang, perbuatan mencabut gigi yang dipandang seorang dokter sudah tidak lagi ada guna atau perbuatan seorang guru yang memukul anak didiknya dengan maksud anak tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya. Apakah seorang dokter, dokter gigi, atau guru tersebut dapat dipidana karena bersalah telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud Pasal 351 KUHP.

Menurut Hoge Raad<sup>20</sup> “Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu merupakan tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu penganiayaan, misalnya jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukuman yang dilakukan secara terbatas menurut kebutuhan oleh para orang tua atau para guru terhadap seorang anak.

Bisa disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang dokter, dokter gigi atau guru tidak dapat dipidana karena perbuatan yang menimbulkan luka atau rasa sakit merupakan tujuan yang dapat dibenarkan karena perbuatan mereka tidak dapat dimasukkan pengertian kesengajaan menimbulkan rasa sakit seperti yang dimaksud dalam Pasal

---

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Citra Grafika, Jakarta, hal. 316.



351 KUHP, karena yang mereka lakukan itu tidak bersifat melawan hukum, Van Hattum-Van Bemmelen.<sup>21</sup>

Noyon dan Langemeijer berpandangan bahwa tidak termasuknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dokter dalam pengertian penganiayaan itu sudah tercermin dari kata penganiayaan itu sendiri untuk dapat disebutkan sebagai suatu penganiayaan, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu harus merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang dapat dibenarkan.

## **2. Unsur-Unsur Penganiayaan**

Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan adalah Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pada rumusan pasal-pasal tersebut, dapat ditemui kalimat-kalimat seperti barang siapa, luka berat, merusak kesehatan, menjadikan sakit dan berhalangan untuk melaksanakan jabatan atau pekerjaan.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

### **a. Unsur Obyektif, yaitu:**

- 1) Unsur barangsiapa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 137.

tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Unsur menjadikan sakit, halangan melakukan jabatan atau pekerjaan, unsur menjadikan/menyebabkan luka-luka berat atau luka parah, unsur merusak kesehatan, dan unsur menyebabkan kematian (bukan sebagai maksud dan tujuan). Unsur-unsur tersebut harus merupakan sebagai tujuan yang ditujukan kepada orang yang dianiaya, bukan merupakan suatu akibat dari penganiayaan.

b. Unsur Subyektif, yaitu:

Unsur dengan sengaja, pengertian sengaja menurut ilmu hukum dibagi atas 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud.
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui dengan pasti atau yakni bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
- 3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan;
- b) Adanya perbuatan; dan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
  - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan
  - 2) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

### **3. Jenis-Jenis Penganiayaan**

Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) jenis, yaitu:

#### **a. Penganiayaan Biasa**

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan Ringan

Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Selain daripada apa yang tersebut dalam Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

d. Penganiayaan Berat

Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

## **D. Tindak Pidana Pengrusakan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “*rusak*” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.<sup>22</sup> Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 386.

KUHP dan BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 KUHP sampai Pasal 412 KUHP.<sup>23</sup>

Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh,

---

<sup>23</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hal. 278.

merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 KUHP ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari Buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda,<sup>24</sup> yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam *Code Penal* Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai *misdrijven tegen de eigendommen*.<sup>25</sup> Didalam Undang-Undang pidana Jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan *beschadigen* atau merusakkan dan *zestoren* atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan *onbruikbaar maken* atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan

---

<sup>24</sup> Simons, *Leerboek II*, hal. 120, di dalam buku P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 301.

<sup>25</sup> *Ibid.*,



*wegmaken* atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan *vernielen* yang artinya menghancurkan dan *beschadigen* yang artinya merusakkan.

## **2. Bentuk-bentuk Pengrusakan Barang Yang di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana**

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

### **1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok**

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP yang menyatakan:

- a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai “binatang”. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP
  - 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
    - a. Barangsiapa;
    - b. Secara melawan hukum;
    - c. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
    - d. Suatu barang; dan
    - e. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum.

b. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Barangsiapa;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
- d. Seekor binatang; dan
- e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja; dan
- b. Secara melawan hukum.

2. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan

pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101 KUHP, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407 KUHP. Demikian pula, jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101 KUHP), atau alat untuk membunuh binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 KUHP jika dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP, yaitu:
  - 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
    - a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
    - b. Suatu barang, dan seekor hewan;
    - c. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
    - d. Harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,-.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja; dan
- b. Melawan hukum.

b. Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP, yaitu:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
- b. Seekor hewan;
- c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan;
- d. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101 KUHP;
- e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja; dan
- b. Secara melawan hukum.

3. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat

dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”.

Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, telegram, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408 KUHP. Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah:

- 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
  - a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai;
  - b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon; dan
  - c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja.

4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)”.

Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 KUHP adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 409 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai;
- b. Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon; dan

c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja.

5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakkan barang tersebut dalam Pasal di atas. Maksud dari si pelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah melawan hukum kata dan pada Pasal 410 KUHP berdiri berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 410 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai;



- b. Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran; dan
  - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum Pasal 411 KUHP.

Ketentuan Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Adapun ketentuan Pasal 367 KUHP adalah:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada Pasal 367 KUHP jo. Pasal 411 KUHP yaitu antara lain merupakan delik aduan.

Tindak pidana dari bab XXVII ini menjadi *relative klachtdelict* seperti halnya pencurian.

#### Pasal 412 KUHP

“Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama.”

Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum hukuman ditambah dengan sepertiga. Adapun unsur-unsur dari Pasal 412 KUHP serupa dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 406 KUHP, hanya saja yang membedakan adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

R. Soesila memberikan penafsiran pada Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “*Melakukan Kekerasan*”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian, kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan

itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.<sup>26</sup>

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian ini atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa fikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain lukan bahkan mati.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 146-147.

- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.<sup>27</sup>

## **E. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa:<sup>28</sup>

“Arti dari pidana itu adalah *straf* menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op. cit*, hal. 5-8.

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, hal. 47.

karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.”

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian pemidanaan, Sudarto, mengemukakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.”

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 12.

<sup>30</sup> M. Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hal. 16.

## 2. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Teori absolut atau teori pembalasan;
- b. Teori relatif atau teori tujuan; dan
- c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*).

Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori absolut

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan.

Sthal, mengemukakan bahwa:<sup>32</sup>

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.”

- b. Teori relatif atau teori tujuan

---

<sup>31</sup> Antonius Sudirman, 2009, *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial – Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, BP Undip, Semarang, hal. 107-112.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 155.

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot, beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.

Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.<sup>33</sup>

### **3. Jenis-Jenis Pidana**

Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok; dan
2. Pidana tambahan.

---

<sup>33</sup> Ilhami Basri, 2003, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Alqaprint, Bandung, hal. 12.

## 1. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah:

### 1) Pidana mati

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum adanya PP No. 2 Tahun 1946 yang berlaku adalah hukuman gantung.

Dalam Pasal 1 PP No.2 Tahun 1964 ini, secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

### 2) Pidana penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang

---

<sup>34</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 110.



dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

### 3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”

### 4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang

---

<sup>35</sup> Niniek Suparni, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.

## 2. Pidana tambahan

Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

## 2) Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim, yaitu berupa barang-barang milik terdakwa, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### 3) Pengumuman putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa:

“Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan Pasal 405 KUHP.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

###### **1. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas, yaitu hakim.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber-sumbernya yaitu buku-buku, majalah, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## 2. Sumber Data

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Untuk jenis data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan pembahasan ini.
2. Untuk data sekunder, penulis melakukan kepustakaan untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain bersumber dari :
  - a. Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan objek penelitian.
  - b. Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, lalu dilakukan deskriptif data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Filosofi Pemberian Penghukuman Dalam Perbuatan Perbarengan**

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dari segi kodifikasinya, kejahatan diatur dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur tersendiri dalam Buku III KUHP. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang masuk kategori pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda.

Jadi, kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai perbedaan. Perbuatan pidana diatas masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama. Akan tetapi, pada kenyataannya seringkali ditemukan adanya suatu perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan kejahatan lain. Ada juga satu perbuatan pelanggaran yang disertai dengan pelanggaran lain. Atau bahkan perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan pelanggaran dan sebaliknya. Adakalanya suatu tindakan pidana yang diatur dalam lebih dari satu ketentuan pidana. Kejadian seperti diatas biasa disebut perbarengan.

*Samenloop* atau *Concursus* ini merupakan salah satu ajaran yang tersulit di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga orang tidak



akan dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbaar feit* itu sendiri, maupun permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam ajaran tersebut, apabila orang itu tidak mengikuti perkembangan paham-paham mengenal perkataan *feit* yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur masalah *samenloop* itu sendiri.

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak disebut *perbarengan* yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau disebut juga dengan *concursum*.

*Perbarengan perbuatan* kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1), yakni *“beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ...”*. Pengertian perbuatan dalam rumusan di Ayat 1 Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat di belakangnya *“sehingga merupakan beberapa kejahatan”*.<sup>36</sup>

Jadi berdasarkan rumusan Ayat (1) Pasal 65 dan 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam *perbarengan perbuatan* itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari *perbarengan perbuatan*.

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, 2009, *PELAJARAN HUKUM PIDANA 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, hal. 141.

Ada tiga bentuk concursus atau perbarengan (gabungan perbuatan), yaitu : Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis* atau *Eendaadse Samenloop*), Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*), dan Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop*) dalam KUHP yang pengaturannya dalam 3 (tiga) Pasal yang berbeda-beda yaitu karena pengaturannya mengenai sistem hukuman dari masing-masing bentuk tersebut adalah berbeda-beda.

Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan. Mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:<sup>37</sup>

1. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65), penjatuhan pidananya dengan menggunakan *sistem hisapan yang diperberat* (*verschepde absorpsi stelsel*), yaitu dijatuhi satu pidana saja (ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat tambah sepertiganya (ayat 2).
2. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan *sistem kumulasi terbatas* (*het gematigde cumulatieve stelsel*), artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan; yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal.142.

dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.

3. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan *sistem kumulasi murni* (het zuivere cumulatieve stelsel), demikian juga;
4. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan *sistem kumulasi murni*, artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan atau penambahan batas tertentu.

Bahwa dalam hal perbarengan perbuatan berlakulah tiga macam sistem pembedaan:<sup>38</sup>

Sistem yang pertama "*hisapan yang diperberat*" berlaku pada beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya, misalnya antara pemerasan (368 maksimum 9 tahun penjara) dengan pembunuhan (338 maksimum 15 tahun penjara). Apabila dua kejahatan itu dilakukan oleh satu orang, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, tetapi dapat diperberat dengan ditambah sepertiganya dari maksimum 15 tahun (yang terberat), sehingga maksimumnya menjadi 20 tahun. Disebut sistem hisapan, karena hanya dijatuhkan satu pidana saja, dan disebut diperberat karena dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terberat. Satu tambah sepertiga adalah maksimumnya, artinya tidak boleh lebih berat daripadanya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal.143.

Sistem yang kedua, sebenarnya untuk mengatasi kendala dari sistem hisapan yang pertama. Dalam hal peristiwa yang demikian, maka diterapkan pidana pada si pembuatnya untuk setiap kejahatan yang dilakukannya, namun dibatasi ialah pidana-pidana yang dijatuhkan itu apabila dijumlahkan maka jumlah itu tidak boleh melebihi dari yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Persoalannya ialah bagaimana dengan pidana denda yang ukuran berat ringannya adalah didasarkan pada nilai rupiah dan sen, sedangkan penjara dan kurungan pada hari, bulan dan tahun. Seperti contoh terakhir, bagaimana mengukur lamanya kurungan pengganti dari denda sebesar Rp 150.000,-? Dalam hal ini telah ditentukan pada ayat (2) Pasal 66, yang menyatakan bahwa dalam hal denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk tindak pidana itu. Untuk hal ini harus melihat pada Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

*“Dalam putusan hakim, lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen”.*

Berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal 30 ini, maka untuk pidana denda atas kejahatan Pasal 403 yang diancam dengan pidana denda maksimum sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka lamanya kurungan pengganti dendanya maksimum 20.000 hari, tetapi ini tidak masuk akal dan tidak mungkin, karena dibatasi oleh ketentuan ayat (3) Pasal 30 yang menyatakan bahwa lamanya kurungan pengganti denda

itu paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, jadi dalam hal ini pidana kurungan pengganti denda maksimum bagi si pembuat atas pelanggaran Pasal 403 tadi adalah enam bulan kurungan. Dalam hal ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, maka lamanya pidana kurungan pengganti denda dapat diperberat, tapi tidak boleh melebihi dari delapan bulan.

Bagaimana penjatuhan pidana dalam perbarengan perbuatan terdiri dari kejahatan yang salah satunya diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, mengingat karena sifatnya-pidana mati atau penjara seumur hidup tidak dapat diperberat? Dalam hal ini apabila hakim menetapkan pidana mati atau penjara seumur hidup, karena sifatnya tidak dapat diperberat lagi, dan menurut Pasal 67 yang menyatakan bahwa:

*“tidak boleh dijatuhi pidana yang lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim”.*

Pada sistem pidanaaan yang ketiga: *kumulasi murni* (Pasal 70 ayat 1), jelas tidak ada pemberatan pidana maupun peringanan pidana, karena baik pelanggaran maupun kejahatan dalam perbarengan peraturan itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan. Namun sebenarnya tidak kumulasi murni, oleh karena dalam ayat (2) Pasal 70 diberi batas tentang lamanya pidana kurungan dan kurungan pengganti denda dalam hal pelanggaran, yakni paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan untuk pidana kurungan; dan 8 (delapan)

bulan untuk kurungan pengganti denda. Dalam hal ini kumulasi pidana penjara atau denda tidak dibatasi.

Dalam hal terjadi perbarengan peraturan antara kejahatan-kejahatan ringan yang disebutkan dalam Pasal 70 bis (302 ayat 1: penganiayaan ringan, 352: penganiayaan ringan, 364: pencurian ringan: 373: penggelapan ringan, 379: penipuan ringan, dan 482: penadahan ringan), maka kejahatan ringan itu dianggap sebagai pelanggaran, dan oleh karena itu, untuk masing-masingnya dijatuhi pidana sendiri-sendiri, dengan batasan bahwa jumlah pidana penjara yang dijatuhkan sendiri-sendiri itu paling banyak 8 (delapan) bulan.

Ketentuan Pasal 70 bis ini bersama-sama dengan ketentuan ayat (3) dari Pasal 64 dimasukkan ke dalam WvS Hindia Belanda (kini KUHP) dalam tahun 1931, dengan maksud untuk menghindari ketimpangan penjatuhan pidana yang dapat terjadi dalam hal penerapan sistem hisapan.

## **B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks)**

### **1. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap	: Tan Moeng Hoei Alias Tan.
Tempat lahir	: Makassar.
Umur / Tgl. Lahir	: 68 Tahun / 27 Februari 1948.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Lamuru No. 36/66, Kota Makassar.  
Agama : Budha.  
Pendidikan : SMP Kls II.  
Pekerjaan : Wiraswasta / Bengkel.

## **2. Posisi Kasus**

Kasus penganiayaan dan pengrusakan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di Jl. Lamuru No. 36/66 Kel. Bontoala, Kec. Bontoala Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, dengan terdakwa Tan Moeng Hoei alias Tan dan korbannya adalah Tam Bung Hong, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Saksi korban Tam Bung Hong dan terdakwa Tan Moeng Hoei alias Tan adalah saudara kandung dan juga bertetangga dengan saksi korban. Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya sedang memarkir kendaraannya, lalu terdakwa Tan Moeng Hoei alias Tan mendekati saksi korban dan memukul pintu mobil saksi korban dengan cara meninju, namun saat itu saksi korban tidak memperdulikan dan langsung masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa berteriak memanggil-manggil saksi korban untuk keluar rumah hingga saksi korban keluar rumah, dan terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga terjatuh dan tangan saksi korban terkena besi, dan keduanya bergulingan diatas tanah dimana perbuatan terdakwa terhenti saat dipisahkan oleh saksi Anto, setelah itu keduanya masuk kedalam rumahnya masing-masing. Setelah dilerai oleh saksi Anto, saksi korban masuk kedalam rumah dan mendengar suara tembok dipukul-pukul dan saat itu tersangka telah menjebol tembok pembatas rumah antara saksi korban dan terdakwa hingga membentuk lubang lalu saksi korban menutup lubang dengan menggunakan tripleks namun terdakwa kembali merusak tripleks tersebut menggunakan besi hingga besi yang digunakan terdakwa mengenai jari tangan saksi korban.

## **3. Dakwaan JPU**

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. JPU harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan

yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. JPU juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum, masing-masing JPU dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan subsider, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan kombinasi.



Dalam perkara Nomor 815/Pid.B/2016/PN.Mks ini, JPU menggunakan dakwaan kombinasi. Dakwaan Kombinasi ini, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Dakwaan Kombinasi, Kesatu: Penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (1) KUHP), atau Kedua: Perkelahian satu lawan satu (Pasal 184 ayat (2) KUHP), dan Ketiga: Penghancuran atau pengrusakan pokok (Pasal 406 ayat (1) KUHP). Dakwaan JPU dalam putusan Nomor 815/Pid.B/2016/PN.Mks ini, akan penulis uraikan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa Tan Moeng Hoei Alias Tan Bun Hui, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jl.Lamuru Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Tam Bung Hong, yang mengakibatkan luka lecet pada punggung tangan dan luka lecet pada jari I dan II.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban yang juga adalah saudara kandung dari terdakwa dan juga bertetangga dengan saksi korban dimana saat itu saksi korban sedang memarkir kendaraannya, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memukul pintu mobil saksi korban dengan cara meninju, namun saat itu saksi korban tidak memperdulikan dan langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa saat saksi korban berada didalam rumah, terdakwa berteriak-teriak dari luar rumah sehingga saksi korban keluar dan seketika itu juga terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tangan saksi korban terkena besi yang menyebabkan punggung

tangan kanan saksi korban terluka, setelah itu saksi korban dan terdakwa bergulingan diatas tanah dimana perbuatan terdakwa terhenti setelah datang saksi Anto menarik saksi korban.

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil alat berupa besi dan memukul-mukulkan ke tembok pemisah/pembatas rumah antara terdakwa dan saksi korban sehingga tembok pembatas tersebut jebol terbentuk lubang, lalu saksi korban mengambil tripleks dan menutup lubang tersebut akan tetapi oleh terdakwa kembali merusak tripleks tersebut menggunakan besi dan saat itu besi yang digunakan terdakwa mengenai jari tangan korban, dimana akibat perbuatan terdakwa telah mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban dimana tangan mengalami bengkak pada tangan korban.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar No: R/58/VER/XI/2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Suciyunita pada tanggal 24 Oktober 2015 yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan luka :

- Terdapat luka lecet dipunggung tangan kanan  $\pm$  1 Cm;
- Terdapat luka lecet di antara sela jari I dan II panjang luka  $\pm$  1 Cm.

Kesimpulan :

V.Ex Coriatum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**ATAU,**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Tan Moeng Hoei Alias Tan Bun Hui, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jl.Lamuru Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Tam Bung Hong, yang

mengakibatkan luka lecet pada punggung tangan dan luka lecet pada jari I dan II.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi korban memarkir kendaraannya, tiba-tiba datang terdakwa mendekati sambil memukul pintu mobil saksi korban namun saksi korban tidak memperdulikan dan langsung masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa saat itu terdakwa tetap saja memanggil-manggil saksi korban untuk keluar rumah hingga saksi korban keluar rumah, dimana terdakwa langsung mendorong saksi korban hingga terjatuh dan tangan saksi korban terkena besi, dan selanjutnya keduanya bergulingan diatas tanah dimana perbuatan terdakwa terhenti saat dipisahkan oleh saksi Anto, setelah itu keduanya masuk kedalam rumah masing-masing.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menjebol tembok rumah pembatas antara rumah saksi korban dan terdakwa hingga membentuk lubang dengan menggunakan sebuah besi dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi korban menutup luba tersebut menggunakan tripleks akan tetapi kembali terdakwa merusak tripleks tersebut menggunakan besi dan saat itu besi yang terdakwa gunakan mengenai jari I dan II saksi korban.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar No: R/58/VER/XI/2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Suciyunita pada tanggal 24 Oktober 2015 yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan luka :

- Terdapat luka lecet dipunggung tangan kanan  $\pm$  1 Cm;
- Terdapat luka lecet di antara sela jari I dan II panjang luka  $\pm$  1 Cm.

Kesimpulan :

V.Ex Coriatum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184

ayat (2) KUHP.

**DAN,**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Tan Moeng Hoei Alias Tan Bun Hui, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat Jl.Lamuru Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN.Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban Tam Bung Hong.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terjadi perselisihan antara saksi korban dan terdakwa, dimana saat itu saksi korban melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa setelah dilerai oleh saksi Anto, saksi korban masuk kedalam rumah dan mendengar suara tembok dipukul-pukul dan saat itu tersangka telah menjebol tembok pembatas rumah antara saksi korban dan terdakwa hingga membentuk lubang lalu saksi korban menutup lubang tersebut menggunakan tripleks namun oleh terdakwa kembali merusak tripleks tersebut menggunakan besi hingga besi yang digunakan terdakwa mengenai jari tangan saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan tembok rumah saksi korban menjadi berlubang/jebol membentuk lubang, dimana saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara PDM-327/R.4.10/Epp.2/05/2016, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Tan Moeng Hoei Alias Tan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu/martil dan pecahan batu merah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

## **5. Amar Putusan**

Dalam perkara Nomor 815/Pid.B/2016/PN.Mks Majelis Hakim memutuskan:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Tan Moeng Hoei Alias Tan, bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan Pengrusakan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu/martil dan pecahan batu merah dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

## 6. Analisis Penulis

Mencermati posisi kasus dalam perkara ini, penerapan pasal atau dakwaan JPU sudah tepat. Menurut Penulis, bahwa No. Perkara 815/Pid.B/2016/PN.Mks ini adalah tindak pidana perbarengan. Tetapi lebih tepatnya tindak pidana perbarengan atau *concursus realis* karena hal itu dapat dilihat dari penganiayaan atau perkelahian satu lawan satu dan pengrusakan yang merupakan beberapa kejahatan.

Yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tangan saksi korban terkena besi yang menyebabkan punggung tangan kanan saksi korban terluka dan selain itu pula terdakwa merusak pembatas milik saksi korban dengan menggunakan palu/martil yang mengakibatkan tembok pembatas membentuk lubang.

Terpenuhinya kesemua unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana, mengharuskan hakim untuk menghukum terdakwa, namun harus pula dilihat perbarengan perbuatannya (*Concursus Realis*) yang terkandung dalam perbuatan pelaku. Terkandungnya *concursus realis* didalam perbuatan terdakwa hendaknya menjadi pertimbangan didalam menjatuhkan pidana.

Hukuman pada kedua dakwaan tersebut adalah sama yaitu pidana penjara dan denda, sehingga konsekuensinya dari jenis *concursus realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis adalah absorpsi yang

dipertajam. Absorpsi yang dipertajam berarti bahwa terdakwa diancam hukuman dengan ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

Dalam wawancara tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Makassar dengan Ketua Majelis Hakim Cening Budiana, SH.MH., dikatakan bahwa tidak dipertimbangkannya *concursum realis* dalam perkara ini, dengan alasan bahwa diantara keduanya baik saksi korban dan terdakwa sudah berdamai. Walaupun disini lain adanya alasan suatu pemberatan pidana dalam teori *concursum* dikatakan sebagai alasan pemberat.

Tetapi manakala diperhadapkan pada tujuan hukum Menurut Friedman ada 3 macam, yaitu: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Selain tujuan hukum ada pula teori-teori hukum terdiri dari: teori etika/etis yaitu tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan; teori utilitas yaitu hukum itu bertujuan untuk kemanfaatan orang terbanyak dalam masyarakat; dan teori campuran yaitu merupakan gabungan antara teori etis dengan teori utilitas, tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, tetapi juga untuk kemanfaatan orang banyak.

Namun, mungkin hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdapat Asas-asas umum dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa Hakim bersifat Aktif, yang artinya hakim boleh memperluas dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk mendapatkan kebenaran materiil atau

kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga tercipta keadilan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak, baik itu korban maupun terdakwa.

Dalam kasus ini, terdakwa secara jelas dan terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan secara berbarengan atau sekaligus. *Concursus realis* dalam kasus ini seperti tidak diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini dapat dilihat dari putusan maupun jawaban hakim pada saat diwawancarai.

Walaupun unsur-unsur yang ada didalam tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan telah terpenuhi, serta didalam penerapan hukum materiilnya pun telah diterapkan secara baik, namun tidak diterapkannya perbarengan (*concursus*) secara baik walaupun sudah berdamai dalam hukum ada yang namanya asas legalitas.

Asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni: tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan, untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi, dan peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

Asas legalitas bertujuan pula untuk memperkuat adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa,



mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat penerapan “the rule of law”. Dan asas legalitas pula itu membentengi hukum pidana materiil dan hukum acara.

Dan menurut penulis, walaupun sudah berdamai tetapi tetap diberikan sanksi yang sedikit lebih ringan dengan penjara 2 (dua) bulan. Tidak ada harga mati untuk penjara walaupun ada kata berdamai antara kedua pihak selaku saksi korban dan terdakwa karena ini bukan delik aduan. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut E.Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana II”<sup>39</sup>, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Dan apabila diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan, oleh jaksa bila telah masuk tingkat penuntutan atau oleh hakim bila masuk persidangan tetapi belum divonis. Tetapi diantara saksi korban dan terdakwa terjadinya perdamaian disaat telah masuk persidangan. Jadi, selaku Hakim memberikan inisiatif kepada pelaku memberikan sanksi yang sedikit lebih ringan.

---

<sup>39</sup> Diana Kusumasari (<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt434a1ff607e98/apakah-penuntutan-kasus-penggelapan-akan-dihentikan-jika-laporan-dicabut?>) diakses pada hari senin, 23 Januari 2017, pukul 17.44 PM.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengrusakan (Studi Kasus Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks)**

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor: 815/Pid.B/2016/PN.Mks, penulis membagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

## **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.

Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

### **A. Keterangan Saksi-Saksi**

#### **1. Saksi Tan Bung Hong, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl.Lamuru di bengkel las No.36 Kel.Bontoala Tua Kec.Bontoala Makassar, saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa benar saat itu saksi korban yang juga adalah saudara kandung dari terdakwa sedang memarkir kendaraannya, selanjutnya turun dari kendaraan dan terdakwa mendekati saksi korban dan terdakwa memukul pintu mobil dengan cara meninju berkali-kali namun saksi korban tidak menghiraukan.
- Bahwa benar setelah itu saksi korban masuk kedalam rumah akan tetapi terdakwa memanggil saksi korban untuk keluar rumah dan menantang untuk berkelahi dimana selanjutnya saksi korban keluar dan sehingga terjadi perkelahian satu lawan satu dimana terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh dan tangan saksi korban terkena besi yang mengakibatkan punggung tangan kanan saksi korban terluka hingga keduanya berguling diatas tanah, dimana perkelahian terhenti setelah Sdr.Anto datang melerai.

- Bahwa benar setelah itu saksi korban masuk kedalam rumahnya begitupun dengan terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa merusak tembok rumah saksi korban dengan cara melubangi tembok pembatas rumah saksi korban dengan terdakwa dengan cara menggunakan palu besi dan setelah membentuk lubang saksi korban lalu menutup dengan tripleks akan tetapi kembali tersangka merusak tripleks tersebut menggunakan besi yang panjangnya 30 Cm dengan cara menusuk dan saat itu saksi korban menahan tripleks menggunakan tangan hingga tangan saksi korban terkena besi milik terdakwa.
- Bahwa benar adapun kerugian yang dialami saksi korban dengan kerusakan tembok adalah sebesar Rp.500.000,-.

## **2. Saksi Wakio Dg. Anto, menerangkan dibawah sumpah**

sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl.Lamuru di bengkel las No.36 Kel.Bontoala Tua Kec.Bontoala Makassar, tersangka telah menganiaya saksi korban.
- Bahwa benar saat lebih 11 meter dari tempat kejadian, dan saat terdakwa melakukan pengrusakan saksi tidak melihat.
- Bahwa benar saat saksi berada ditempat kejadian saksi melihat saksi korban dengan terdakwa sudah berguling diatas tanah.
- Bahwa benar pada saat perkelahian terjadi keduanya tidak menggunakan alat, dimana selanjutnya saksi meleraikan keduanya.
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi mendengar suara orang memukul tembok dari arah bengkel saksi korban, dan saat saksi masuk kedalam ruang kerja saksi korban saksi melihat lubang pada tembok pembatas antara rumah saksi korban dengan terdakwa.

- Bahwa benar saat itu saksi melihat luka pada punggung tangan dan sela jari tangan kanan saksi korban.

### **3. Saksi Muh. Yusuf Alias Yuseng,** menerangkan

dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl.Lamuru di bengkel las No.36 Kel.Bontoala Tua Kec.Bontoala Makassar.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat langsung karena berada sekitar 1 meter dari tempat kejadian, dimana sebelumnya saksi berada dilokasi sedang las kursi, saat itu saksi korban memarkir kendaraan dan tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi korban sambil memukul pintu mobil saksi korban, lalu saksi korban berjalan masuk kedalam rumah tanpa menghiraukan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap saja memukul pintu mobil saksi korban hingga saksi korban keluar dan terjadilah perkelahian antara saksi korban dan tersangka dan akhirnya dilerai oleh saksi Anto.
- Bahwa benar berselang kurang lebih 10 menit saksi mendengar ada suara orang memukul-mukul tembok dari arah samping rumah dan saat itu saksi korban memanggil saksi untuk masuk kedalam rumah dan saat itu saksi melihat tembok pembatas sudah berlubang.
- Bahwa benar atas kejadian perkelahian tersebut saksi korban mengalami luka pada punggung tangan dan sela jari tangan kanan.

### **B. Keterangan Terdakwa**

**Terdakwa Tan Moeng Hoei Alias Tan Bun Hoi,** didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl.Lamuru di bengkel las No.36 Kel.Bontoala Tua Kec.Bontoala Makassar, tersangka telah menganiaya saksi korban.
- Bahwa benar saat itu saksi korban yang juga adalah saudara kandung dari terdakwa sedang memarkir kendaraannya, selanjutnya turun dari kendaraan dan terdakwa mendekati saksi korban dan terdakwa memukul pintu mobil dengan cara meninju berkali-kali namun saksi korban tidak menghiraukan.
- Bahwa benar setelah itu saksi korban masuk kedalam rumah akan tetapi terdakwa memanggil saksi korban untuk keluar rumah dan menantang untuk berkelahi dimana selanjutnya saksi korban keluar dan sehingga terjadi perkelahian satu lawan satu dimana terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh dan tangan saksi korban terkena besi yang mengakibatkan punggung tangan kanan saksi korban terluka hingga keduanya berguling diatas tanah, dimana perkelahian terhenti setelah Sdr.Anto datang melerai.
- Bahwa benar setelah itu saksi korban masuk kedalam rumahnya begitupun dengan terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa merusak tembok rumah saksi korban dengan cara melubangi tembok pembatas rumah saksi korban dengan terdakwa dengan cara menggunakan palu besi dan setelah membentuk lubang saksi korban lalu menutup dengan tripleks akan tetapi kembali terdakwa merusak tripleks tersebut menggunakan besi yang panjangnya 30 Cm dengan cara menusuk dan saat itu saksi korban menahan tripleks menggunakan tangannya hingga tangan saksi korban terkena besi milik terdakwa.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban dengan kerusakan tembok adalah sebesar Rp.500.000,-.

### **C. Barang Bukti**

- Pecahan tembok yang dirusak;

- 1 (satu) buah palu/martil yang panjangnya sekitar 20 Cm yang gagangnya terbuat dari besi.

Alat Bukti Surat :

Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari RS Pelamoni Makassar No : R/58/VER/XI/2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Suciyunita, pada tanggal 24 Oktober 2015, yang menyimpulkan sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet diantara sela jari I dan II panjang luka  $\pm$  1 Cm.

Kesimpulan:

- V.Eoriatum.-

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka.

Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu:

1. Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa Tan Moeng Hoei.

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menimbulkan Luka

Bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat berupa visum et repertum fakta bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memeluk sambil mendorong saksi korban hingga terjatuh dan tangan saksi korban mengenai besi yang mengakibatkan tangan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak.

Adapun unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Berikut pembuktian unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu:

1. Barangsiapa



Telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa terdakwa telah merusak dengan cara menjebol tembok pembatas antar rumah saksi korban dengan terdakwa, dimana terdakwa melakukan tanpa seijin dari saksi korban.

3. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Bahwa terdakwa telah merusak tembok pembatas milik saksi korban dengan menggunakan palu/martil yang mengakibatkan tembok pembatas membentuk lubang.

Oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kedua penuntut umum menurut penulis sudah tepat.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) KUHP di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka disimpulkan bahwa dakwaan JPU sudah terbukti seluruhnya.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Alasan-alasan pengecualian pidana secara umum dibagi atas:

1. Alasan pembenar

- Daya paksa relatif (*relative overmacht*);
- Pembelaan darurat (*noodweer*);
- Menjalankan ketentuan undang-undang; dan
- Melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

2. Alasan pemaaf

- Tidak mampu bertanggung jawab;
- Daya paksa mutlak (*absolute overmacht*);
- Pembelaan yang melampaui batas; dan
- Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Berdasarkan pada proses pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa tersebut, maka atas diri dan perbuatan terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Mengenai alasan pengurangan pidana, Pasal 22 ayat (4) KUHP menyatakan “masa penangkapan atau penahanan dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. Maka dari rumusan Pasal 22 ayat (4) KUHP ini, sangat beralasan bagi para terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditahan dan demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan terdakwa tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya pidana yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan tersebut.

## **2. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti yang tertera dalam surat putusan yaitu, sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- b. Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka

pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Tan Moeng Hoei Alias Tan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

### **3. Analisis Penulis**

Kasus No. 815/Pid.B/2016/PN.Mks., merupakan kasus dengan kandungan concursus realis didalamnya. Dimana bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan mengingat konsekuensi dari concursus realis itu sendiri. Yang mana dari beberapa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memiliki ancaman pidana pokok yang sejenis, maka konsekuensinya dari concursus realis yang ancaman pidana pokoknya sejenis yakni ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Hakim dalam putusannya No. 815/Pid.B/2016/PN.Mks., hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, adapun hal-hal sebagaimana yang dimaksud yakni sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Tidak dimasukkannya concursus kedalam pertimbangan putusan karena diantara kedua pihak yaitu saksi korban dan terdakwa sudah berdamai. Tetapi disisi lain ada alasan pemberatan pidana dari concursus dikatakan sebagai alasan pemberat. Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum adalah dakwaan kombinasi. Dakwaan Kombinasi ini, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Namun, dalam Asas-asas Umum Hukum Pidana terdapat Asas hakim bersifat Aktif, yang artinya hakim boleh menambahkan dan memperluas dakwaan, selama dakwaan tersebut. Menambahkan dari Hakim Cening Budiana, SH.MH., selaku Ketua Majelis Hakim dari hasil wawancara pada tanggal 3 Januari 2017 mengatakan terdakwa di pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan tidak dikaitkan dengan concursus realis sebagai pemberatan pidana dalam teori concursus dikatakan alasan pemberat.

Walaupun unsur-unsur yang ada didalam tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan telah terpenuhi, serta didalam penerapan hukum materiilnya pun telah diterapkan secara baik, namun tidak diterapkannya perbarengan (*concursum*) secara baik walaupun sudah berdamai dalam hukum ada yang namanya asas legalitas. Asas legalitas

bertujuan pula untuk memperkuat adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh penerapan “the rule of law”. Dan asas legalitas pula itu membentengi hukum pidana materiil dan hukum acara.

Itu karena dari terdakwa dan saksi korban merupakan saudara kandung serta bersebelahan rumah dan antara kedua belah pihak selaku keluarga dari saksi korban dan terdakwa sudah adanya kata perdamaian. Meskipun sudah berdamai tetapi tetap diberikan sanksi yang sedikit lebih ringan dengan penjara 2 (dua) bulan. Tidak ada harga mati untuk penjara walaupun ada kata berdamai antara kedua pihak selaku saksi korban dan terdakwa karena ini bukan delik aduan. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan, oleh jaksa bila telah masuk tingkat penuntutan atau oleh hakim bila masuk persidangan tetapi belum divonis. Tetapi diantara saksi korban dan terdakwa terjadinya perdamaian disaat telah masuk persidangan. Jadi, selaku Hakim memberikan inisiatif kepada pelaku memberikan sanksi yang sedikit lebih ringan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65).
2. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66).
3. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan *sistem kumulasi murni* (het zuivere cumulatieve stelsel), demikian juga;
4. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan *sistem kumulasi murni*, artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan atau penambahan batas tertentu.

2. Bahwa Penerapan Hukum Pidana dan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan pada perkara No.815/Pid.B/2016/PN.Mks telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) semua telah terpenuhi yang mana terdakwa



dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, bila dilihat durasi penjara yang diputuskan hakim maka penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim tidak menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam dilihat dari perbuatan terdakwa digolongkan pidana yang sejenis/*concursum realis*. Beberapa perbuatan masing-masing perbuatan itu sendiri sebagai suatu tindak pidana, apabila kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga, sistem ini biasa dinamakan absorpsi yang dipertajam.

3. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara pidana No.815/Pid.B/2016/PN.Mks adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, namun dalam penjatuhan pidananya hakim tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam *Concursum* atau Perbarengan tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Perbuatan gabungan ataupun *concursum* sangat jarang diterapkan dalam praktek peradilan sehingga selaku terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan itu adalah tindak pidana perbarengan, maka sebaiknya ketentuan tindak pidana perbarengan atau lebih khususnya perbuatan gabungan haruslah diterapkan dengan kasus yang sama ataupun sejenis perbuatannya agar selaku terdakwa bisa mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang tindak pidana perbarengan ini.

2. Hendaknya ada peningkatan sumber daya manusia bagi aparat penegak hukum sehingga pemahaman mengenai concursus dapat lebih mendalam.

3. Hendaknya hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan adanya concursus yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam penjatuhan bahwa terdakwa melakukan suatu Concursus atau Perbarengan Tindak Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2010. *Yusril Versus Criminal Justice System*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- , 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- , Yuyun Widaningsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- , Haeranah, SH., MH., Nur Azisa, SH., MH., dan Kaisaruddin, K, SH.,. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial – Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip. Semarang.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- E. Utrecht. 1962. *Hukum Pidana II*. Penerbitan Universitas. Bandung.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ilhami Basri. 2003. *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*. Alqaprint. Bandung.
- I Made Widnyana. 2010. *Hukum Pidana*. Penerbit Fikahati Aneska. Jakarta.
- J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Niniek Suparni. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Abadi. Bandung.

- , 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Citra Grafika. Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Politeia. Bogor.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

**Internet :**

Diana Kusumasari

(<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt434a1ff607e98/apakah-penuntutan-kasus-penggelapan-akan-dihentikan-jika-laporan-dicabut?>) diakses pada hari senin, 23 Januari 2017, pukul 17.44 PM.